

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyajikan informasi keuangan yang akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat diandalkan. Laporan Keuangan Daerah berisi data tentang berbagai komponen struktur kekayaan dan finansial, serta pencerminan hasil aktivitas tertentu. Istilah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mencakup semua laporan dan berbagai penjelasan yang mengakui laporannya dan diakui sebagai bagian dari laporan keuangan. Hal ini memerlukan sistem informasi keuangan yang memadai, transparan, dan akuntabel, yang diwujudkan melalui penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). LKPD disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan kepada aset, sehingga informasi yang disajikan harus berkualitas.

Untuk membuktikan bahwa LKPD itu berkualitas, maka setiap tahun Badan Pengawas Keuangan (BPK) yang merupakan lembaga yang memeriksa dan menilai laporan keuangan pemerintah daerah akan memberikan opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Ketika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LKPD, dapat dikatakan bahwa laporan keuangan entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan



Wajar dan berkualitas. Laporan keuangan pada dasarnya merupakan informasi yang dihasilkan dari manajemen pemerintah yang membantu dalam pengambilan

keputusan dan menunjukkan bahwa entitas pelaporan bertanggung jawab atas sumber daya yang diberikan kepada pembuat laporan (Indria Sari (2017)). Setiap tahun, LKPD menerima penilaian berupa opini dari BPK. Jika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada LKPD, ini menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut disajikan dan diungkapkan dengan wajar dan berkualitas.

Selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. SAP menjelaskan bahwa karakteristik kualitas laporan keuangan adalah ukuran aset yang harus diwujudkan dalam informasi akuntansi agar dapat mencapai tujuannya. Kualitas pelaporan keuangan menggambarkan sejauh mana informasi keuangan yang disajikan oleh suatu entitas sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan yang berkualitas tinggi menunjukkan bahwa informasi yang terkandung di dalamnya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang berkualitas juga harus mampu menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat keputusan. Kualitas pelaporan keuangan menunjukkan bahwa informasi keuangan yang disajikan oleh suatu entitas sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan yang baik juga menunjukkan bahwa informasi yang diberikan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang baik juga mampu memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna untuk membuat keputusan Laporan



an pemerintah harus memenuhi keempat kriteria tersebut untuk mencapai  
a, karena keempat kriteria tersebut merupakan prasyarat aset yang

diperlukan untuk memenuhi kualitas yang diinginkan. Informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi standar nilai informasi yang ditetapkan oleh undang-undang. Jika tidak sesuai dengan perundang-undangan, itu dapat mengakibatkan kehilangan wilayah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (Sri Mulyati *et al.*, (2019)

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah sistem yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintahan yang mencakup kegiatan dan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi operasional, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP terdiri dari beberapa unsur, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan pengendalian intern. Berdasarkan PP 60 Tahun 2008, bahwa seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah dilakukan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik disebut dengan Pengawasan Intern (Swastika & Sari Widhiyani (2020)

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, Indonesia memiliki otonomi daerah. Sesuai dengan peraturan undang-undang, undang-undang ini memberikan daerah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai



dengan keinginan masyarakat. Otonomi yang luas dimaksudkan untuk membuat pemerintah daerah lebih efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintah daerah yang diharapkan dapat mencapai *good government governance*.

Menurut Lembaga Administrasi Negara (2000), *Good Government Governance* (GGG) merupakan pemerintahan yang baik adalah menjalankan pemerintahan yang stabil, bertanggung jawab, dan efisien, dengan memastikan bahwa interaksi konstruktif terjadi di antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 menyatakan bahwa pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mengemban, menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, demokrasi, efisiensi, efektivitas, dan supermasi hukum dan dapat diterima oleh masyarakat secara keseluruhan. (Zai F *et al.*, (2020)

Implementasi SPIP dan GGG yang efektif berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan SPIP yang baik, kesalahan dan kecurangan dapat diminimalkan, sehingga informasi keuangan yang disajikan lebih andal dan akurat (Kaomaneng *et al.*, (2023). Sementara itu, penerapan GGG memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan gambaran yang sebenarnya mengenai kondisi keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang menerapkan SPIP dan GGG dengan baik cenderung menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas. Laporan keuangan ini sangat penting untuk



milan keputusan pemerintah dan untuk memberikan informasi yang akurat  
at dipercaya kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan laporan keuangan pemerintah daerah, diperlukan komitmen yang kuat untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan sistem pengendalian internal yang efisien. Hal ini akan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah (Sanjaya *et al.*, (2017).

Dengan diberlakukannya otonomi daerah, terjadi perubahan dalam pengelolaan keuangan yang ditandai dengan adanya tiga undang-undang penting di bidang keuangan negara, yaitu: UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Ketiga undang-undang ini mengatur pengelolaan keuangan negara secara lebih demokratis dan menetapkan sanksi bagi pengelola keuangan negara. Akibatnya, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan mereka sendiri, yang akan memunculkan tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Lalu, laporan keuangan pemerintah daerah akan diaudit oleh BPK RI, yang berfungsi sebagai auditor eksternal untuk pemerintah daerah di Indonesia. Selain itu, kualitas LKPD ditentukan oleh penilaian yang diberikan oleh BPK setiap tahunnya dari opini auditor eksternal BPK. Penilaian ini terdiri dari empat tingkatan: Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).



Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 dan UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pemeriksaan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara oleh BPK, dengan penetapan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), menandakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintahan disusun dengan wajar dan berkualitas tinggi. Berdasarkan siaran pers BPK RI pada tahun 2021, jumlah LKPD yang menerima opini WTP mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2016, sebanyak 379 LKPD, yang mewakili 70% dari total LKPD, mendapatkan opini WTP. Jumlah ini meningkat pada tahun 2020 menjadi 486 LKPD, atau 90% dari total.

**Tabel 1. 1 Hasil Opini BPK atas LKPD Kota Makassar Tahun 2018 – 2023**

Tahun	Hasil Opini BPK
2018	WTP
2019	WTP
2020	WDP
2021	WTP
2022	WTP
2023	WTP

Sumber : <https://sulsel.bpk.go.id/kota-makassar/>

Berdasarkan tabel 1.1 hasil opini BPK RI atas LKPD Kota Makassar yang diperoleh pada periode tahun 2018 – 2023 menunjukkan bahwa Kota Makassar



diperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2018, 2019, 2022, dan 2023. Namun, pada tahun 2020, opini yang diperoleh adalah

Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Berdasarkan hasil opini BPK atas LKPD Kota Makassar dari tahun 2018 hingga 2023.

Fenomena ini menunjukkan bahwa secara umum, kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Makassar telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan yang baik, sebagaimana dibuktikan dengan opini WTP yang diperoleh selama lima dari enam tahun. Opini WTP ini mengindikasikan bahwa laporan keuangan Kota Makassar disajikan dengan wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Namun terlihat pada tabel, di tahun 2020 BPKAD Kota Makassar menerima opini audit WDP. Berdasar pada beberapa sumber yang ada, hal ini disebabkan karena adanya kekosongan jabatan Wali Kota sehingga menyebabkan beberapa permasalahan internal seperti pengendalian dan pelaporan keuangan yang tidak sesuai dengan standar,. Lebih lanjut, kondisi WDP ini kurang efektifnya pengendalian dari level pimpinan serta komunikasi internal yang mungkin terhambat karena peralihan kepemimpinan dan ketidakjelasan tanggung jawab antar pemangku jabatan sementara. Konsistensi dalam memperoleh opini WTP pada tahun-tahun berikutnya (2021, 2022, dan 2023) menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Makassar telah melakukan perbaikan yang signifikan terhadap sistem pengendalian internal dan pelaporan keuangan setelah tahun 2020. Hal ini menandakan adanya upaya yang serius dari pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelaporan keuangan mereka.



Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mencerminkan tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Namun, kualitas ini masih menjadi perhatian serius di Indonesia. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2023, hanya 70% pemerintah daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), menurun dari 75% pada tahun sebelumnya. Fenomena ini mengindikasikan masih adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Kualitas laporan keuangan pemerintah dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, di antaranya adalah efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan penerapan *Good Government Governance*. SPIP yang efektif berperan dalam memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, serta meminimalkan risiko kesalahan atau kecurangan. Sementara itu, *Good Government Governance* mendorong terciptanya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, yang merupakan elemen penting dalam pengelolaan keuangan publik yang baik.

Kualitas laporan keuangan dapat diukur melalui indikator tambahan, seperti ketepatan waktu penyampaian laporan, kepatuhan terhadap standar akuntansi, dan kelengkapan informasi yang disajikan. Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa efektivitas SPIP dan penerapan *Good Government*



*nce* secara signifikan memengaruhi kualitas laporan keuangan daerah melalui peningkatan keandalan, relevansi, dan transparansi keuangan.

Kondisi yang sama juga terjadi pada BPKAD Kota Bandung pada tahun 2019. Masalah utama yang ditemukan adalah terkait pengelolaan aset daerah, termasuk aset yang tidak teridentifikasi dengan baik dan tidak didukung dengan bukti administrasi yang cukup, dimana BPK mencatat bahwa beberapa aset daerah masih dalam penguasaan pihak ketiga tanpa pengelolaan yang jelas. Dapat disimpulkan bahwa, aktivitas pengendalian seperti inventarisasi aset, rekonsiliasi data aset, serta pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa mungkin tidak berjalan dengan efektif. Hal lain yang dapat disimpulkan adalah bagaimana ketidakmampuan untuk memonitor dan mencatat aset dengan baik merupakan indikasi bahwa penilaian risiko yang terkait dengan pengelolaan aset dan pencatatan tidak dilakukan secara memadai.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan variabel Sistem Pengendalian Internal pada penelitian ini adalah (Agustiningtyas *et al.*, (2020), (Heinrich & Probohudono (2023), (Indrayani & Widiastuti (2020),(R.Reynanto (2023). Hasil Penelitian tersebut membuktikan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan variabel *Good Government Governance* (GGG) pada penelitian ini adalah (Zai F *et al.*, (2020), (Masitoh *et al.*, (2020), Hasil Penelitian tersebut membuktikan bahwa *Good Government Governance* (GGG) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil lain ditemukan oleh (R.Reynanto (2023)



*ood Government Governance* (GGG)

Penelitian ini merupakan replikasi dari temuan R.Reynanto, (2023). Persamaan penelitian ini dengan R.Reynanto, (2023) adalah sama-sama meneliti tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan *Good Government Governance* dengan menggunakan hasil kuisisioner yang disebar sebagai data primer. Perbedaan temuan ini dengan temuan R.Reynanto, (2023) adalah objek penelitian yang digunakan pada temuan sebelumnya adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Maros, sedangkan pada temuan ini dijadikan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar sebagai objek penelitian.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Good Government Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”**. Objek dari penelitian ini difokuskan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah peneliti sebagai berikut :

1. Apakah SPIP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada BPKAD Kota Makassar?
2. Apakah Good Governance Government berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada BPKAD Kota Makassar?
3. Apakah SPIP dan GGG berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada BPKAD Kota Makassar?



### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembahasan rumusan masalah di atas, tujuan peneliti adalah untuk mengidentifikasi:

1. Pengaruh penerapan SPIP terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada BPKAD Kota Makassar.
2. Pengaruh penerapan Good Governance Government terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada BPKAD Kota Makassar.
3. Pengaruh penerapan SPIP dan GGG SPIP terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada BPKAD Kota Makassar.

### 1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Kegunaan teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi kepada pembaca yang akan mempelajari dan memahami disiplin ekonomi dan bisnis terutama dalam ilmu akuntansi sektor publik, yang akan memberikan perspektif tentang SPIP, pemerintahan yang baik, dan kualitas laporan keuangan daerah khususnya di Kota Makassar.
2. Kegunaan Praktis. Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan informasi tentang cara menilai kualitas laporan keuangan daerah. Selain itu, penelitian ini akan digunakan sebagai masukan untuk membangun serta mempertahankan kinerja BPKAD untuk mewujudkan *good governance*.



## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini akan terdiri dari lima Bab:

Pada Bab I, merupakan bab pendahuluan. Bab pendahuluan ini memberikan uraian tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah tersebut, kegunaan penelitian, ruang lingkup batasan penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka. Pada bab, tinjauan pustaka berisi landasan teori yang bermanfaat sebagai landasan agar fokus penelitian sesuai dengan hasil yang hendak dicapai. Landasan teori juga nantinya akan memberikan penjelasan mengenai data temuan dalam penelitian. Dalam bab ini pula terdapat kerangka pikir penelitian yang menjelaskan alur hubungan antara variabel dan teori yang digunakan dalam penelitian.

Pada Bab III, merupakan bab metode penelitian. Bab metode penelitian membahas mencakup rancangan penelitian, tempat dan waktu, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrument penelitian serta analisis data.

Pada Bab IV, merupakan bab pembahasan. Dalam bab ini, penulis memaparkan gambaran umum objek penelitian, deskripsi data hasil temuan, gambaran dan pembahasan hasil penelitian, serta hubungan antara teori dengan data yang menjadi temuan di lapangan.



Pada Bab V, merupakan penutup. Bab ini berisikan kesimpulan terkait dengan pembahasan hasil penelitian, saran, serta keterbatasan dalam penelitian



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Stewardship Theory

Teori stewardship menggambarkan situasi di mana manajer tidak didorong oleh tujuan individu, tetapi lebih fokus pada pencapaian hasil utama demi kepentingan organisasi. Teori ini didasarkan pada prinsip-prinsip psikologi dan sosiologi yang menunjukkan bahwa eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai dengan keinginan prinsipal. Selain itu, steward menunjukkan komitmen tinggi terhadap organisasi mereka dan berusaha mencapai tujuan organisasi. Teori ini dirancang untuk membantu peneliti memeriksa kondisi di mana eksekutif perusahaan sebagai steward dapat termotivasi untuk bertindak demi kepentingan terbaik principalnya (Donaldson dan Davis, (1989, 1991) (Anton (2016).

Dalam Teori Stewardship, pemerintah berperan sebagai pengelola sumber daya, sementara rakyat adalah pemilik sumber daya. Kesepakatan antara pemerintah (steward) dan rakyat (principal) didasarkan pada kepercayaan dan tujuan bersama organisasi. Dalam konteks organisasi sektor publik, akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah sebagai pengelola untuk melaporkan kegiatannya kepada rakyat, yang memberi amanah. Pemerintah harus mengungkapkan informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan organisasi. Organisasi sektor publik bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan bertanggung jawab kepada publik, sehingga teori stewardship dapat diterapkan dalam public (Haliah (2013).



yusunan laporan keuangan pemerintah, pemerintah sebagai steward an untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna

laporan keuangan (principal). Implikasi teori stewardship dalam penelitian ini menjelaskan peran pemerintah daerah sebagai lembaga yang dapat dipercaya, yang berfungsi untuk menampung aspirasi publik, menyediakan layanan publik yang berkualitas, dan mempertanggungjawabkan anggaran yang telah dipercayakan. Dengan demikian, tujuan ekonomi dapat tercapai dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara optimal (R.Reynanto (2023)

## 2.1.2 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

### a. Pengertian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 1992, Committee of Sponsoring Organizations (COSO) secara teoretis mendefinisikan pengendalian internal sebagai proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel satuan usaha lainnya, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai mengenai pencapaian tujuan dalam hal: (1) keandalan pelaporan keuangan, (2) kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, serta (3) efektivitas dan efisiensi operasi (Pitaloka *et al.*, (2020)

Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah berpedoman pada Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien, n keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan gan yang berlaku (R.Reynanto (2023).



## b. Indikator Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Menurut PP No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, terdapat lima indikator dalam sistem pengendalian internal, meliputi:

### 1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian mencakup integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, struktur organisasi yang mendukung, pembagian tugas dan tanggung jawab, serta kebijakan dan praktik sumber daya manusia yang sehat.

### 2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Penilaian risiko adalah proses identifikasi dan analisis risiko yang dapat menghalangi pencapaian tujuan organisasi. Proses ini melibatkan penilaian risiko terhadap pencapaian tujuan baik di tingkat entitas, aktivitas, maupun individu.

### 3. Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*)

Kegiatan pengendalian merupakan suatu tindakan yang diambil untuk mengatasi risiko dan memastikan bahwa kebijakan serta prosedur yang telah ditetapkan dilaksanakan secara efektif. Kegiatan ini termasuk otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, peninjauan kinerja, pembatasan akses, serta pemisahan tugas.

### 4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Unsur ini memastikan bahwa informasi yang relevan dan berkualitas tinggi disampaikan dan dipertukarkan di dalam entitas serta kepada pihak eksternal. Komunikasi



perlu untuk menjalankan dan mengendalikan aktivitas organisasi.

an (*Monitoring*)

Pemantauan adalah proses penilaian berkala terhadap kualitas kinerja sistem pengendalian internal, termasuk melakukan audit internal dan evaluasi lainnya untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pengendalian.

### 2.1.3 Good Government Governance (GGG)

#### a. Pengertian Good Governance

Menurut Mardiasmo (2018) *Good governance* diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Sementara itu, World Bank mengartikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang kokoh dan bertanggung jawab yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan efisiensi pasar, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi dalam ranah politik maupun administratif, melaksanakan disiplin anggaran serta menciptakan legal dan political framework untuk mendukung pertumbuhannya kegiatan usaha. Untuk mewujudkan *good governance* diperlukan reformasi kelembagaan (*institutional reform*) dan reformasi manajemen publik (*public management reform*).

*Good Governance* pada hakikatnya hadir sebagai solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di suatu negara. Dengan *Good Governance*, peran pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dapat terintegrasi untuk mencapai konsensus bersama yang dapat dipertanggungjawabkan, efektif, dan efisien. Dengan memperhatikan nilai-nilai dan cara kerja *Good Governance*, potensi penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan dapat diminimalisir karena program-program yang ditetapkan didasarkan pada keputusan bersama (Handayani & Nur (2019)



#### n Good Government Governance (GGG)

*Government Governance* dapat diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang baik sebagai pengelolaan manajemen pembangunan yang kokoh dan bertanggung

jawab, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan pasar efisiensi. Upaya pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat tercermin dalam pencapaian kinerja yang sesuai dengan komitmen yang telah ditetapkan (Hasibuan Y (2022))

Menurut (Hasibuan Y (2022)) dapat disimpulkan bahwa *Good Government Governance* adalah sebuah pengelolaan pembangunan yang kuat, akuntabel, dan transparan untuk mencapai tujuan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melaksanakan tugas-tugas publik sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

### c. Indikator Good Government Governance (GGG)

Karakteristik pelaksanaan *good governance* menurut United Nations Development Programme (UNDP) (Mardiasmo (2018))

#### 1. Partisipasi (*Participation*)

Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah. Partisipasi ini didasarkan pada kebebasan berbicara dan berasosiasi.

#### 2. Kerangka Hukum (*Rule of Law*)

Kerangka hukum yang adil, diterapkan secara konsisten dan tidak diskriminatif, serta menjamin perlindungan hak asasi manusia.

#### 3. Transparansi (*Transparency*)

Didasarkan pada kebebasan untuk memperoleh informasi yang memadai dan dapat diakses oleh publik. Proses pengambilan keputusan serta pelaksanaannya



; dapat dipahami oleh masyarakat.

gung Jawab (*Responsiveness*)

Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani kebutuhan dan aspirasi masyarakat atau stakeholder.

5. Berorientasi Konsensus (*Consensus Orientation*)

Pengambilan keputusan harus memperhatikan berbagai kepentingan dalam masyarakat untuk mencapai konsensus yang bermanfaat bagi banyak pihak.

6. Berkeadilan (*Equity*)

Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kesejahteraannya tanpa adanya diskriminasi.

7. Efektifitas dan Efisiensi (*Efficiency and Effectiveness*)

Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara efisien dan efektif untuk menghasilkan hasil yang maksimal dengan sumber daya yang ada.

8. Akuntabilitas (*Accountability*)

Setiap lembaga publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik atas segala tindakan dan keputusan yang diambil.

9. Visi Strategis (*Strategic Vision*)

Penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi yang jauh ke depan serta memahami kompleksitas sejarah, budaya, dan sosial yang ada untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Menurut Zeyn dalam penelitian (R.Reynanto (2023) menyebutkan bahwa dari



n indikator/elemen di atas terdapat tiga pilar atau elemen utama yang memiliki keterkaitan dalam mengaktualisasikan *good governance*, yaitu visi, partisipasi, dan akuntabilitas

## 2.1.4 Kualitas Laporan Keuangan

### a. Pengertian Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pengertian Laporan Keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi - transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Kualitas laporan keuangan daerah merupakan hasil proses identifikasi, kuantifikasi, dan pendokumentasian transaksi ekonomi (keuangan) suatu entitas akuntansi pemerintah daerah, sebagai sarana pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait untuk mengambil keputusan ekonomi yang tepat. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah penting karena salah satu bentuk tata kelola pemerintahan yang baik. Laporan keuangan yang berkualitas dapat memberikan manfaat dalam upaya mengambil kebijakan suatu pemerintahan di masa yang akan datang (Ayuningsih *et al.*, (2022)

### b. Indikator Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Susanti & Andayani (2017) di penelitian (R.Reynanto (2023) dalam mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas, standar normatif yang diterapkan merujuk pada empat karakteristik laporan keuangan sebagaimana diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010, yaitu:

#### 1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mennevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan.



Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

### 3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

### 4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Berdasarkan ke empat indikator ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dapat digunakan secara efektif oleh berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Daftar Penelitian Terdahulu

	Nama Peneliti  (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
--	------------------------------	------------------	------------------



	Sri Mulyati, Neli. Faridah, Eva. Prawiranegara, Benny (2019)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Sistem Pengendalian Intern dengan kualitas laporan keuangan memiliki hubungan yang kuat dengan arah yang positif, terdapat pengaruh signifikan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Ciamis
	Agustiningtyas, Vika Erinna. Yogivaria, Wirshandono (2020)	Pengaruh Good Governance, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pada OPD Kota Malang	Berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa secara simultan, variabel good governance, sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), dan kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di OPD Kota Malang. Namun, secara parsial, hanya good governance dan SPIP yang berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kompetensi sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas LKPD.
rba, in		Pengaruh Penerapan Good Government	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan good



(2020)	Governance Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Studi Kasus pada BPKPAD Kabupaten Nias Barat)	government governance memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Demikian pula, kompetensi sumber daya manusia juga terbukti berpengaruh positif secara signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Analisis data mengungkapkan bahwa koefisien determinan penelitian ini adalah 0,711 % yang berarti bahwa 71,1% variasi dalam kualitas informasi laporan keuangan dapat dijelaskan oleh penerapan good government governance dan kompetensi sumber daya manusia. Sisanya sebesar 28,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak tercakup dalam penelitian ini.
Masitoh, Tullah, Apriyanti (2020)	Pengaruh Penerapan Good Government Governance Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Di Provinsi Jawa Barat Dan	Berdasarkan hasil penelitian ini. menunjukkan bahwa penerapan Good Government Governance terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat dan Banten. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pelaporan



		Banten)	keuangan daerah. Di sisi lain, kompetensi sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di kedua provinsi tersebut.
	Firmansyah I, Sinambela T (2020)	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil dari Pengendalian Internal di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat, pengendalian internal tersebut dinilai baik karena tingginya persentase responden yang mendukung dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Internal yang diterapkan sudah baik dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selanjutnya, kualitas laporan keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat juga dinilai baik karena besarnya pengaruh yang diakui oleh responden. Ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan berada pada level yang baik. Dalam hal pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap

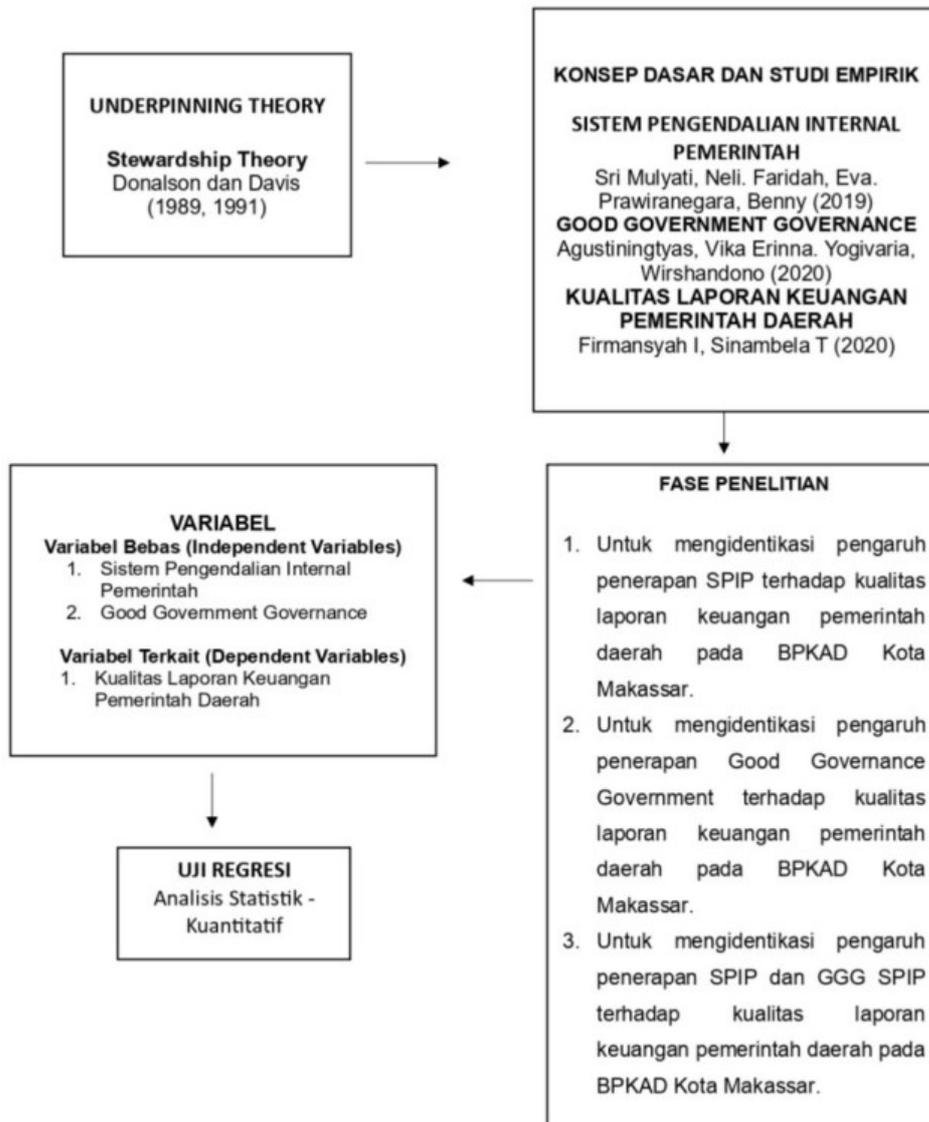


			<p>Kualitas Laporan Keuangan, hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi sistem pengendalian internal memiliki dampak positif terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya, semakin baik sistem pengendalian internal yang diterapkan, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.</p>
--	--	--	---

### 2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual **pada penelitian ini** berfungsi sebagai panduan visual yang menggambarkan hubungan antara variabel penelitian. Dalam hal ini, **Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)** dan **Good Government Governance (GGG)** berperan sebagai variabel bebas (independent variable) yang diharapkan mempengaruhi **Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)** sebagai variabel terkait (dependent variable).





**Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual**

## 2.4 Kerangka Penelitian

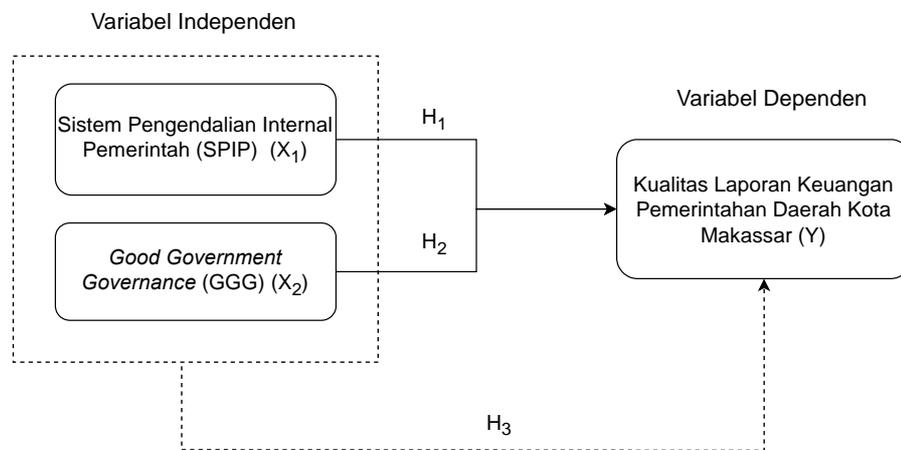
Kerangka penelitian merupakan komponen yang sangat berpengaruh pada suatu penelitian yang mana memiliki tujuan dalam menjelaskan objek yang akan diteliti secara



yang menggambarkan yang jelas dan sistematis terkait objek yang akan diteliti. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa besar suatu variabel yakni, penerapan SPIP dan *good government governance* berpengaruh

terhadap suatu variabel dependen, dalam hal ini yakni kualitas LKPD Kota Makassar.

Berikut adalah gambaran kerangka pemikiran dari penelitian ini:



**Gambar 2. 2 Kerangka Penelitian**

Keterangan :

—————> = Secara parsial menunjukkan pengaruh

-----> = Secara simultan menunjukkan pengaruh

H<sub>1</sub> = Pengaruh SPIP (X<sub>1</sub>) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

H<sub>2</sub> = Pengaruh GGG (X<sub>2</sub>) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

H<sub>3</sub> = Pengaruh SPIP dan GGG secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

## 2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan suatu tanggapan sementara mengenai bagaimana suatu masalah dirumuskan dalam penelitian, dan rumusan masalah tersebut digambarkan melalui kumpulan



karena itu, hipotesis ini hanyalah solusi sementara yang perlu diverifikasi selesai untuk menyederhanakan analisis masalah. Pernyataan topik,

penelitian teoritis, penelitian sebelumnya, dan kerangka konseptual dapat menjadi sumber hipotesis penelitian berikut.

### **2.5.1 Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Dalam teori Stewardship memberikan perspektif yang relevan untuk memahami hubungan antara penerapan SPIP dan kualitas laporan keuangan. Menurut teori ini, pemimpin organisasi dianggap sebagai steward (pengelola) yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya dengan baik demi mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks pemerintah daerah, pemimpin yang menerapkan SPIP secara konsisten akan dapat mengelola keuangan daerah dengan lebih efektif dan efisien. Hal ini sejalan dengan prinsip stewardship yang menekankan pada tanggung jawab, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan.

Sistem pengendalian internal pemerintah merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk memastikan keandalan dan ketepatan informasi keuangan pemerintah, efisiensi dan efektivitas operasional pemerintah, serta kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku dan telah ditetapkan (Agustiningtyas *et al.*, (2020)

Sistem pengendalian internal pemerintah berfungsi untuk memastikan bahwa tujuan organisasi akan tercapai, pelaporan keuangan tetap akurat, aset negara dilindungi, dan ketaatan terhadap peraturan. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah digunakan oleh pemimpin dan atasan untuk memberikan arahan dan mencegah penggelapan atau kecurangan. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang lemah meningkatkan risiko kesalahan, ketidakakuratan, dan kecurangan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik memiliki kualitas yang lebih tinggi karena SPIP yang kuat mengurangi penyimpangan atau kecurangan dalam laporan keuangan.



Pelaksanaan sistem pengendalian internal di pemerintah daerah dapat meningkatkan keandalan, objektivitas, serta mencegah ketidakkonsistenan dalam informasi keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, penerapan sistem pengendalian internal pemerintah akan membantu dalam menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sri Mulyati *et al.*, (2019) menemukan bahwa penerapan sistem pengendalian internal pemerintah memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

**H<sub>1</sub>: Penerapan SPIP memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**



### 2.5.2 Pengaruh Good Government Governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Teori stewardship menekankan bahwa pejabat publik, sebagai pengelola, memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk mengelola keuangan negara secara transparan, akuntabel, dan efektif. Dalam **Good Government Governance** teori stewardship menyoroti bahwa penerapan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efisiensi berkontribusi pada peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, teori stewardship menjadi landasan penting dalam memahami bagaimana tata kelola yang baik mampu memperbaiki kualitas laporan keuangan di sektor publik.

*Good Government Governance* diwujudkan melalui pengelolaan pemerintahan yang efektif dengan menerapkan prinsip-prinsip partisipasi, keterbukaan, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa semua sumber daya daerah dikelola secara optimal untuk mencapai tujuan yang berfokus pada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan pemerintah daerah menjadi tolok ukur kualitas laporan tersebut. Pengelolaan pemerintahan yang baik juga berperan penting dalam pencapaian karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah daerah dengan memenuhi standar kualitas yang diharapkan (Zai F *et al.*, (2020)

Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Masitoh *et al.*, (2020) yang membuktikan bahwa *good government governance* berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

**H<sub>2</sub> : Good Government Governance memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**



### 2.5.3 Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Good Government Governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam perspektif teori *stewardship*, pemimpin dan pengelola keuangan pemerintah bertindak sebagai pelayan (*stewards*) yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya publik dengan amanah, transparansi, dan akuntabilitas. Teori ini berasumsi bahwa *stewards* memiliki komitmen intrinsik untuk bertindak demi kepentingan organisasi dan masyarakat, tanpa mementingkan kepentingan pribadi.

Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) membantu *stewards* menjalankan tugasnya dengan memastikan proses pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku, mengurangi potensi kesalahan, kecurangan, dan penyimpangan. Sistem ini memberikan pengawasan yang terstruktur sehingga mendukung para *stewards* untuk berfokus pada pencapaian tujuan organisasi.

Sementara itu, penerapan *Good Government Governance* (GGG) memperkuat integritas dan akuntabilitas pengelola keuangan melalui prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan kepatuhan hukum. Dalam kerangka teori *stewardship*, GGG berfungsi sebagai pedoman bagi *stewards* untuk bertindak secara profesional dan bertanggung jawab, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya.

Dengan demikian, penerapan SPIP dan GGG yang efektif berkontribusi pada peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan yang berkualitas mencerminkan keberhasilan *stewards* dalam memenuhi tanggung jawab mereka kepada publik, sesuai dengan prinsip dasar teori *stewardship*.



**Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Good Government Governance (GGG) secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**